

Mulai 16 Agustus, GeNose C19 Digunakan di Kompleks Parlemen

JAKARTA (IM) - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mulai 16 Agustus mendatang akan menggunakan alat pendeteksi Covid-19 berbasis embusan nafas yaitu GeNose C19 di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta.

Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar menilai, penggunaan GeNose memudahkan petugas keamanan internal dan kesehatan DPR melakukan pengecekan terhadap pengunjung.

"Selain tes swab antigen, kami menggunakan GeNose yang lebih efektif dan praktis. Sehingga metode pengamanannya, protokol kesehatannya menjadi berlipis," kata Indra dalam keterangannya, Selasa (10/8).

Menurut Indra, penggunaan GeNose C19 akan melengkapi layanan tes Covid-19 lainnya di Kompleks Parlemen yaitu swab antigen. Indra mengatakan, penggunaan GeNose C19 juga untuk memastikan semua pihak yang hendak masuk lingkungan parlemen tak terinfeksi Covid-19.

Ia mengapresiasi kelancaran training pengoperasian GeNose C19 di kantor pelayanan kesehatan (yankes) DPR,

Senin (9/8).

"Alat buatan Universitas Gadjah Mada (UGM) tersebut merupakan buatan dalam negeri yang kemampuannya sudah teruji dan akurat," ucapnya.

"Apalagi, GeNose juga penggunaannya instan, sederhana, user friendly, hanya butuh beberapa menit. Mitra-mitra kami yang antusiasnya sudah expired date, bisa segera menggunakan GeNose di lokasi," katanya menambahkan.

Indra lebih lanjut mengatakan, penggunaan GeNose di DPR akan diterapkan dalam pelaksanaan Sidang Tahunan MPR dan Pidato Kenegaraan Presiden Joko Widodo dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Republik Indonesia yang ke-76, sidang bersama DPR dan DPD serta Sidang Paripurna DPR tentang RAPBN pada 16 Agustus 2021. Ia mengatakan, jalannya sidang tersebut akan dilaksanakan secara minimalis, sederhana dan tanpa memakan waktu yang lama.

"Di masa sidang-sidang komisi, akan digunakan GeNose untuk mem-back up protokol kesehatan yang sudah ada di DPR. Ini demi kesehatan dan keselamatan bersama," ujarnya. ● han

KPK: Capaian MCP untuk 542 Pemda Baru 22 Persen

JAKARTA (IM) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggandeng Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Pusat dan Daerah untuk mengoptimalkan program pencegahan korupsi di daerah.

KPK menyelenggarakan workshop terkait dengan platform pencegahan korupsi pemerintah daerah melalui Monitoring Center for Prevention (MCP) dari tanggal 9 hingga 20 Agustus 2021.

Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah V KPK Budi Waluya menjelaskan bahwa rencana peluncuran pengelolaan MCP bersama ini, berbarengan dengan Rakorwada Nasional pada minggu ketiga Agustus 2021.

"Untuk itu, selama 8 hari ini, KPK akan berbagi tentang detail indikator dan subindikator MCP agar Kemendagri dan BPKP dapat lebih dahulu mengenal dan memberi masukan," kata Budi dalam keterangan tertulis, Selasa (10/8).

Budi mengatakan bahwa KPK telah memetakan dela-

pan area intervensi pada pemda yang menjadi fokus pencegahan korupsi.

Delapan fokus itu yakni perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan, pengawasan APIP, manajemen ASN, manajemen aset daerah, optimalisasi pajak daerah, dan tata kelola dana desa.

"Saat ini capaian MCP 2021 secara nasional untuk 542 pemda baru mencapai 22 persen," katanya.

Sementara itu, Inspektur Jenderal Kemendagri Tumpak H Simanjuntak mengatakan bahwa Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sangat menaruh perhatian dan antusias dengan MCP.

Sejak MCP ada beberapa tahun lalu, kata Tumpak, sudah digunakan Kemendagri untuk pembinaan internal. Oleh karena itu, menurut dia, perlu penguatan pemahaman terhadap delapan area intervensi terutama indikator dan subindikator yang sangat dinamis sesuai dengan implementasi peraturan perundang-undangan yang ada. ● han

2 Polhukam

IDN/ANTARA



KPK PERIKSA M TAUFIK
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik menjawab pertanyaan wartawan usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Selasa (10/8) malam. M Taufik diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul, Kelurahan Pondok Ronggon, Cipayung, Jakarta Timur.

LaporCovid-19 Desak Pemerintah Tak Abaikan Data Kematian Sebagai Indikator Evaluasi PPKM

Berdasarkan data yang dikumpulkan LaporCovid-19, sedikitnya 19.000 kematian yang sudah dilaporkan oleh pemerintah kabupaten/kota, tapi tak tercatat di data pemerintah pusat.

JAKARTA (IM) - Kolaborasi LaporCovid-19 mendesak Pemerintah tidak mengabaikan data kematian sebagai indikator evaluasi diterapkannya Pemberlakuan Kebijakan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4.

Koordinator Tim Lapor Data LaporCovid-19, Said Fariz Hibban mengatakan, data kematian adalah indikator dampak dan skala pandemi yang perlu diketahui warga agar tidak abai terhadap risiko.

"Pemerintah wajib membenahi teknis pendataan, serta memasukkan data kematian probabel, bukan menghilangkannya," kata Said dalam keterangan tertulis yang diterima wartawan di Jakarta, Rabu (11/8).

Menurut Said, ketidakakuratan data kematian seharusnya tidak menjadi alasan bagi pemerintah untuk mengabaikan data tersebut. Ia mengatakan, dengan menyadari adanya ketidakakuratan, pemerintah

seharusnya memperbaiki data kematian tersebut agar menjadi akurat. Terlebih, data kematian yang selama ini diumumkan pemerintah belum cukup untuk menggambarkan besarnya dampak pandemi Covid-19.

"Hal ini karena jumlah kematian yang diumumkan pemerintah pusat ternyata masih jauh lebih sedikit dibanding data yang dilaporkan pemerintah daerah," ujarnya.

Selain itu, Said mengatakan, pemerintah seharusnya juga mempublikasikan jumlah warga yang meninggal dengan status probable agar masyarakat memahami secara lebih akurat dampak pandemi yang terjadi.

Lebih lanjut, Said menambahkan, kesenjangan data atau gap angka kematian masih terjadi. Berdasarkan data yang dikumpulkan LaporCovid-19, ada lebih dari 19.000 kematian yang sudah dilaporkan oleh pemerintah kabupaten/kota, tapi tak tercatat di data pemer-

intah pusat.

Data dari 510 pemerintah kabupaten/kota yang dikumpulkan hingga 7 Agustus 2021 menunjukkan, 124.790 warga yang meninggal dengan status positif Covid-19.

Sementara itu, jumlah kematian positif Covid-19 yang dipublikasikan pemerintah pusat pada waktu yang sama sebanyak 105.598 orang. "Artinya, antara data pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah pusat, terdapat selisih 19.192 kematian," ucapnya.

Sebelumnya diberitakan, pemerintah memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 2-4 di Jawa-Bali, 10-16 Agustus 2021. Dalam menetapkan wilayah PPKM Level 2-4 yang berlaku sepekan ke depan, pemerintah tak lagi menggunakan indikator angka kematian pasien Covid-19.

"Evaluasi tersebut kami lakukan dengan mengulurkan indikator kematian dalam penilaian," kata Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan dalam konferensi pers, Senin (9/8) lalu.

Menurut Luhut, langkah itu diambil karena berdasar hasil

evaluasi PPKM sebelumnya ditemukan input akumulasi data kematian selama beberapa pekan ke belakang. Hal itu menyebabkan data terdistorsi sehingga mempengaruhi penilaian tingkat kematian pasien

Covid-19 di suatu daerah.

"Menyangkut ini pun kami sekarang terus bekerja keras untuk mengharmonisasi data dengan itu juga memperbaiki Silacak (Sistem Informasi Pelacakan)," ujar Luhut. ● mei

Wahid Foundation Fokus Perkuat Promosi Perdamaian dan Kesetaraan Gender

JAKARTA (IM) - Wahid Foundation berkolaborasi dengan UN Women menggelar Webinar melalui Forum NUS-ANTARA (Gerakan Nasional untuk Indonesia Damai, Adil, dan Setara) pada Selasa (10/8).

Direktur Wahid Foundation, Yenny Wahid dalam sambutannya mengatakan, kegiatan webinar tersebut bertujuan untuk memperluas diseminasi mekanisme pencegahan kekerasan berbasis gender dan ekstremisme kekerasan berbasis komunitas demi membangun Desa/Kelurahan Damai.

Selain itu, juga untuk memperkuat sinergi antar lembaga organisasi masyarakat sipil dan pemerintah.

"Desa Damai tidak hanya membangun interaksi secara positif dengan mereka yang memiliki nilai-nilai berbeda. Perempuan sebagai agen perdamaian juga dipastikan terlindungi dari ancaman kekerasan melalui mekanisme yang dibentuk oleh komunitas," ujar Yenny.

Lebih lanjut, Yenny menyampaikan, forum NUSANTARA diinisiasi agar menjadi sarana untuk berbagi cerita di Desa Damai tentang praktik

baik yang terjadi di desa. "Kami membekali desa/kelurahan dengan serial panduan Aksi Desa/Kelurahan Damai. Di samping itu, kami juga menyediakan layanan digital berbasis teknologi atau e-learning bagi yang mau belajar dan berlatih cara membangun Desa/Kelurahan Damai. Silahkan diakses di peacevillage id," terang Yenny.

Yenny menyampaikan, sampai saat ini sebanyak 14 Desa/Kelurahan Damai telah melakukan deklarasi dari total 30 Desa/Kelurahan Damai yang didampingi oleh Wahid Foundation sejak 2017. Pada kurun waktu 2020-2021, Desa/Kelurahan Damai merancang Rencana Aksi Desa/Kelurahan Damai untuk membangun mekanisme pencegahan kekerasan dan konflik dengan pendekatan keamanan insani dan responsif gender.

Jamshed Kazi, UN Women Representative and Liaison to ASEAN mengatakan bahwa upaya tersebut diperkuat dengan memajukan kepemimpinan perempuan, pemberdayaan ekonomi perempuan, dan melindungi perempuan dan anak perempuan dari kekerasan berbasis gender. ● mei

KPK Amankan Sejumlah Dokumen dari Rumah Dinas Bupati Banjarnegara

JAKARTA (IM) - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan pada Selasa (10/8) di tiga lokasi terkait dugaan korupsi pengadaan, pemborongan, ataupun persewaan di Dinas PUPR Banjarnegara tahun 2017 - 2018.

Adapun, tiga lokasi yang digeledah yakni Rumah Dinas Bupati Banjarnegara, Budhi Sarwono, yang berlokasi di Jalan Dipayuda Kelurahan Kutabanjarnegara.

Kemudian, Kantor Bupati Banjarnegara serta sebuah rumah yang diduga dihuni oleh orang kepercayaan Budhi Sarwono, di daerah Krandengan.

Dari tiga lokasi tersebut, tim penyidik mengamankan berbagai macam dokumen yang disinyalir terkait kasus dugaan korupsi pemborongan, pengadaan atau persewaan pada Dinas PUPR Banjarnegara, tahun 2017 - 2018.

"Pada tiga lokasi tersebut, tim penyidik menemukan dan mengamankan berbagai barang bukti, di antaranya berbagai dokumen yang diduga terkait dengan perkara," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Rabu (11/8).

"Penyitaan nantinya akan dilakukan terhadap berbagai barang bukti tersebut untuk menjadi salah satu bagian dalam pemberkasan perkara penyidikan ini," ujarnya.

Sebelumnya, tim dari KPK menggeledah Kantor Dinas PUPR dan perusahaan kontraktor PT Bumi Rejo (PT BR) yang terletak di Jalan DI Panjaitan, Banjarnegara, pada Senin, 9 Agustus 2021. Dari dua lokasi itu, tim juga mengamankan berbagai dokumen yang diduga berkaitan dengan perkara ini.

Sekadar informasi, KPK saat ini sedang menyidik ka-

sus dugaan korupsi terkait kegiatan pengadaan, pemborongan, ataupun persewaan di Dinas PUPR Banjarnegara tahun 2017 - 2018. Tak hanya korupsi, KPK juga mengusut dugaan gratifikasi.

Sejalan dengan adanya proses penyidikan tersebut, KPK telah menetapkan sejumlah tersangka dalam kasus ini. Kabarnya, salah satu yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini adalah Bupati Banjarnegara.

Sayangnya, KPK masih enggan membeberkan siapa saja pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi di Dinas PUPR Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah tersebut.

KPK akan mengumumkan secara lengkap kronologis serta pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka setelah adanya proses penanganan dan penahanan. ● han



IDN/ANTARA

TARGET SERTIFIKASI PEKERJA KONSTRUKSI
Pekerja melakukan pengecatan Jembatan Terusan di Indramayu, Jawa Barat, Rabu (11/8). Pemerintah menargetkan sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi (TKK) pada tahun 2022 sebanyak 81.200 orang.

Camat Patumbak Imbau Warganya Agar Selalu Pakai Masker jika ke Luar Rumah

DELI SERDANG (IM) - Kendati korban keganasan virus Corona terus berjatuhan, namun hingga kini masih banyak masyarakat yang tak tertib menerapkan protokol kesehatan, di antaranya memakai masker, seperti yang dilakukan warga Deli Serdang, Sumatera Utara (Sumut).

Sebanyak 35 warga Deli Serdang kedatangan membandel abaikan protokol Kesehatan (prokes), di tengah meningkatnya penyebaran Covid-19. Mereka tidak mengenakan masker saat beraktifitas di luar rumah.

Puluhan warga yang terjerang dalam razia PPKM Level 3 itu diberikan hukuman fisik squat jump, push up serta menyanyikan lagu 'Indonesia Raya' dan melafalkan teks Pancasila.

Razia dilakukan Tim Satgas Covid-19 Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang di seputaran Jalan Pertahanan, Simpang Tiga, Desa Patumbak Satu serta

Desa Patumbak Kampung, Rabu (11/8) siang.

Warga yang terjerang Razia tidak memakai masker saat berkendara. Padahal, penyebaran Covid-19 di 8 desa di Kecamatan Patumbak saat ini meningkat dan memasuki zona merah.

Camat Patumbak, Syahdin Setia Budi mengatakan, usai menjalani hukuman, para pelanggar prokes kemudian diberi masker serta diperingati untuk selalu menjaga prokes. Jika ditemukan lagi melakukan pelanggaran maka akan diberi sanksi lebih berat.

"Razia PPKM Level 3 ini akan terus dilakukan pihak Satgas Covid Kecamatan Patumbak hingga penyebaran Covid-19 menurun. Berdasarkan laporan yang diterima pihak kecamatan, ada delapan desa yang memasuki zona merah, di antaranya Desa Patumbak Satu, Patumbak Kampung, Marindal Satu dan Marindal Dua," ujar Syahdin. ● mar



IDN/ANTARA

OPERASI KRI RE MARTADINATA

Komandan Guspurla Koarmada III Laksamana Pertama TNI Retiono Kunto (kanan) memberi arahan saat pemeriksaan personel KRI RE Martadinata 331 di perairan Maluku, Rabu (10/8). KRI RE Martadinata-331 di bawah kendali operasi Komandan Guspurla Koarmada III Laksamana Pertama TNI Retiono Kunto, memulai operasi pengamanan perbatasan laut Indonesia wilayah Timur dimulai dari perairan Maluku hingga perbatasan dengan negara tetangga.